

Dampak Pemekaran Kabupaten Kolaka Timur Terhadap Kemajuan Ekonomi Masyarakat Infastruktur Daerah

Risky Guswari¹, Naidah², Ismail Rasulong³

Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pemekaran Kabupaten Kolaka Timur terhadap kemajuan ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur daerah. Pemekaran wilayah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah yang sebelumnya kurang terjangkau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran Kabupaten Kolaka Timur memberikan dampak positif dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, terbukanya lapangan pekerjaan, serta bertambahnya program pemberdayaan masyarakat. Di sisi infrastruktur, terjadi peningkatan pembangunan jalan, fasilitas publik, serta layanan kesehatan dan pendidikan. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, SDM, dan akses wilayah masih menjadi hambatan. Secara keseluruhan, pemekaran memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan daerah, meskipun masih membutuhkan perbaikan di berbagai aspek.

Kata Kunci: Pemekaran Wilayah, Ekonomi Masyarakat, Infrastruktur, Pembangunan Daerah

Abstract

This study aims to determine the impact of the regional expansion of Kolaka Timur Regency on community economic development and regional infrastructure improvement. The regional expansion was carried out to enhance the effectiveness of public services and accelerate economic growth in previously underserved areas. This research employs a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews, field observations, and documentation. Informants include local government officials, community leaders, and residents. The findings indicate that the expansion of Kolaka Timur Regency has had a positive impact on increasing economic activity, creating job opportunities, and introducing various community empowerment programs. In terms of infrastructure, there have been improvements in roads, public facilities, as well as health and education services. However, challenges such as budget limitations, human resource capacity, and geographical access remain obstacles. Overall, the regional expansion contributes to accelerating regional development, although improvements in several aspects are still needed.

Keywords: Regional Expansion, Community Economy, Infrastructure, Regional Development

Copyright (c) 2025 Risky Guswari

✉ Corresponding author : riskyguswari38@gmail.com

Email Address : naida@unismuh.ac.id , ismailrasulong17@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah merupakan salah satu langkah strategis dalam mengelola tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik. Pemekaran wilayah bertujuan untuk mengatasi masalah yang muncul akibat wilayah yang terlalu besar atau terlalu padat, sehingga pengelolaan sumber daya alam, kebijakan pembangunan, serta pelayanan publik menjadi kurang efektif dan efisien. Melalui pemekaran, pemerintahan diharapkan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat setempat. Secara umum, pemekaran wilayah dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat agar kebijakan yang diambil lebih mencerminkan kebutuhan dan potensi daerah (Bimantio & Tontowi, 2018).

Pemekaran wilayah di Indonesia telah dilakukan sejak awal era reformasi, dan hal ini menjadi bagian integral dari kebijakan desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan otonomi daerah. Desentralisasi memberi kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan domestik mereka, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Pemekaran wilayah menjadi alat untuk mencapai tujuan ini dengan memberikan daerah yang baru terbentuk kesempatan untuk merencanakan dan mengelola pembangunan secara lebih terfokus dan efektif (Assiddiq et al., 2023). Pemekaran wilayah bukan hanya dilatarbelakangi oleh kebutuhan administratif, tetapi juga faktor sosial dan politik yang penting. Salah satunya adalah untuk mempercepat pemerataan pembangunan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Dalam beberapa kasus, pemekaran wilayah diharapkan dapat merespons secara lebih cepat terhadap aspirasi masyarakat yang ingin memiliki pemerintahan yang lebih dekat dengan mereka. Sebagai contoh, banyak daerah yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Akhmad, 2015).

Di sisi lain, meskipun pemekaran memberikan banyak keuntungan, tidak jarang proses ini juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama bagi daerah yang baru terbentuk. Proses pemekaran sering kali memerlukan waktu yang panjang, tenaga yang besar, dan alokasi sumber daya yang tidak sedikit untuk memastikan bahwa daerah yang baru terbentuk dapat berfungsi dengan baik. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa daerah yang baru memiliki kapasitas pemerintahan yang cukup untuk mengelola wilayah mereka dengan efektif. Selain itu, pemekaran juga sering kali diikuti dengan peningkatan biaya administrasi dan pengeluaran pemerintah, yang dapat menjadi beban bagi daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya yang cukup. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pemekaran wilayah dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang ada (Bimantio & Tontowi, 2018).

Kabupaten Kolaka Timur resmi dimekarkan dari Kabupaten Kolaka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013, yang ditetapkan pada 11 Januari 2013. Pemekaran ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi di Indonesia dengan tujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan, mempercepat

pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Sebagai kabupaten baru, Kolaka Timur diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri sumber daya yang dimilikinya, termasuk dalam pengambilan kebijakan yang lebih terfokus pada kebutuhan masyarakat lokal. Setelah pemekaran, berbagai sektor mulai berkembang, terutama dalam bidang infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal pemerataan pembangunan dan kapasitas administratif daerah. Kabupaten Kolaka Timur memiliki lokasi strategis yang berbatasan dengan Laut Jawa di bagian utara dan Selat Makassar di bagian selatan, yang memberikan peluang besar bagi pengembangan sektor-sektor unggulan yang bisa mendukung perekonomian daerah. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, Kolaka Timur masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi setelah pemekaran, seperti pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Syukur et al., 2021).

Pemekaran wilayah ini diharapkan dapat mengatasi ketimpangan pembangunan antara Kabupaten Kolaka yang lebih besar dengan Kabupaten Kolaka Timur yang baru terbentuk. Sebelumnya, Kabupaten Kolaka memiliki luas wilayah yang sangat besar, yang menyebabkan pengelolaan wilayah menjadi kurang optimal. Dengan pemekaran, Kolaka Timur diberikan ruang yang lebih luas untuk berkembang dan mengelola sumber daya mereka dengan lebih fokus. Salah satu tujuan utama pemekaran ini adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta peluang ekonomi yang lebih baik. Dengan pemekaran, Kolaka Timur diharapkan dapat lebih mudah mengakses dana pusat, meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah, dan mempercepat laju pembangunan di seluruh sektor. Oleh karena itu, pemekaran ini diharapkan menjadi katalisator bagi pembangunan yang lebih merata di wilayah tersebut (Assiddiq et al., 2023)

Tinjauan Teori

1. Teori pembangunan ekonomi Teori pembangunan ekonomi merupakan sebuah konsep dan kerangka pemikiran yang menjelaskan proses terjadinya pembangunan ekonomi dalam suatu negara atau wilayah. Teori-teori ini menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, distribusi kekayaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengurangan kemiskinan. Teori-teori ekonomi dapat digunakan untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi di daerah pemekaran dengan menganalisis bagaimana berbagai faktor memengaruhi dinamika dan pembangunan ekonomi di wilayah yang baru dibentuk tersebut. Daerah pemekaran merupakan wilayah yang terbentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan mengurangi ketimpangan antarwilayah (Tadaro & Smith, 2011)

2. Konsep Desentralisasi

Konsep desentralisasi telah diakui secara luas sebagai elemen penting dalam mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Hutahaean, 2020). Di Indonesia, penerapan kebijakan desentralisasi bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemberdayaan pelayanan serta meningkatkan daya saing daerah. Para ahli cenderung mendefinisikan desentralisasi menurut perspektif mereka masing-masing, sehingga pengertian tersebut belum tentu diterima oleh semua pihak. Benyamin Hoessein mendefinisikan desentralisasi sebagai pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan kewenangan tertentu kepada daerah tersebut oleh pemerintah pusat. Sementara itu, menurut Phillip Mawhod, desentralisasi adalah pembagian sebagian kekuasaan pemerintah

pusat kepada kelompok-kelompok lain yang memiliki otoritas di wilayah tertentu suatu negara (Matita, 2012).

Menurut Smith dalam Matita (2012), tujuan desentralisasi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dari sisi pemerintah pusat, ada empat tujuan utama dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu: pendidikan, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokrasi dalam sistem pemerintahan daerah. Kedua, dari sisi pemerintah daerah, desentralisasi bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan politik, menciptakan akuntabilitas lokal, dan meningkatkan responsivitas lokal (Matita, 2012).

3. Konsep Pemekaran Wilayah Otonom

Konsep pemekaran wilayah otonom merujuk pada proses pembentukan daerah administratif baru dari wilayah yang lebih besar sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Konsep ini banyak diterapkan di negaranegara dengan sistem desentralisasi, termasuk Indonesia (Akhmad, R. 2015).

4. Ukuran kemajuan sosial

Kemajuan ekonomi merupakan konsep yang mengukur tingkat pertumbuhan atau perkembangan ekonomi suatu negara, wilayah, atau komunitas. Pengukuran ini mencakup aspek kuantitatif seperti pertumbuhan pendapatan, serta aspek kualitatif seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat (Hill, H. 1996).

Pemekaran yang efektif dapat mempercepat kemajuan ekonomi dengan mendekatkan pemerintah pada masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah yang sebelumnya kurang berkembang. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, pemekaran harus diiringi dengan kebijakan pembangunan yang inklusif, pemerataan sumber daya, dan pemberdayaan ekonomi lokal (World Bank, 2021). Pemekaran Kabupaten Kolaka Timur, jika dikaitkan dengan konsep ukuran kemajuan ekonomi, dapat dianalisis melalui beberapa indikator ekonomi yang terpengaruh oleh perubahan administratif dan kebijakan pembangunan di daerah tersebut (BPS Kolaka Timur, 2023).

5. Infrastruktur daerah

Infrastruktur daerah merujuk pada fasilitas dan prasarana fisik yang mendukung berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dalam suatu wilayah. Infrastruktur ini meliputi berbagai sistem dan fasilitas yang mempermudah proses produksi dan distribusi barang, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Teori infrastruktur daerah menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memastikan pemerataan pembangunan antar wilayah (Barro, R. J. 1990). Teori ini juga menyoroti bahwa infrastruktur yang baik akan meningkatkan efisiensi ekonomi, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta memperbaiki kualitas hidup. Pembangunan infrastruktur dianggap sebagai pilar utama dalam mendukung kegiatan ekonomi di suatu wilayah (Barro, R. J. 1990). Infrastruktur yang baik, seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan sistem energi, memfasilitasi kelancaran proses produksi, memperluas akses pasar, dan menurunkan biaya transaksi. Misalnya, infrastruktur transportasi yang baik dapat mempercepat distribusi barang ke pasar-pasar yang lebih luas, meningkatkan daya saing produk lokal, serta membuka peluang usaha baru (World Bank, 1994).

METODOLOGI

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi Lapangan melakukan pengamatan mengamati langsung kondisi infrastruktur, pola aktivitas ekonomi masyarakat, serta respons masyarakat terhadap kebijakan pemekaran.
2. Wawancara Mendalam yang dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memahami pengalaman dan persepsi mereka terkait pemekaran.
3. Dokumentasi Definisi Operasional Menguraikan a. Definisi setiap variabel secara spasifik agar dapat diukur secara empiris dan konsisten. b. Indikator pengukuran adalah ciri atau aspek yang dapat diamati dan digunakan untuk mengukur variabel yang telah didefinisikan secara operasional.

Metode Analisis Data Tahapan analisis adalah:

- a. Reduksi Data - Menyaring dan mengelompokkan informasi yang relevan.
- b. Penyajian Data - Mengorganisasi data dalam bentuk narasi atau tabel untuk memudahkan analisis.
- c. Penarikan Kesimpulan Menginterpretasikan temuan berdasarkan data yang diperoleh dan teori yang relevan. Analisis dilakukan dengan metode analisis tematik, di mana data dikategorikan berdasarkan tema yang muncul dari hasil wawancara dan observasi.

Selain itu, pendekatan triangulasi data diterapkan untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci yang memiliki keterkaitan langsung terhadap dampak pemekaran Kabupaten Kolaka Timur, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

1. Kebijakan implementasi kemekaran

- a. Apa tujuan utama dari pemekaran Kabupaten Kolaka Timur? Tujuan utama dari pemekaran Kabupaten Kolaka Timur adalah 38 untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di wilayah yang sebelumnya kurang terjangkau oleh pemerintah Kabupaten Kolaka induk. Daerah Kolaka Timur memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang cukup besar, namun pengelolannya kurang optimal karena faktor geografis dan keterbatasan jangkauan pemerintahan sebelumnya. Dengan adanya pemekaran, diharapkan masyarakat bisa lebih cepat mendapatkan pelayanan administrasi, fasilitas infrastruktur dapat lebih merata, serta roda perekonomian masyarakat bisa berkembang lebih baik melalui kebijakan-kebijakan yang lebih fokus dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Beliau menyampaikan bahwa tujuan utama dari pemekaran Kabupaten Kolaka Timur adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah yang sebelumnya kurang terjangkau oleh pemerintah Kabupaten Kolaka induk.

(Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumardi. SE pejabat fungsional pranata komputer ahli muda pada tanggal 17 februari 2025)

b. Bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan pemekaran ini? Perencanaan pemekaran diawali dengan pengkajian terhadap potensi wilayah, jumlah penduduk, kesiapan administrasi, serta aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya pemerintahan yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Dilakukan koordinasi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta DPRD untuk menyusun dokumen usulan pemekaran yang kemudian diajukan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dalam proses ini, dilakukan juga berbagai studi kelayakan dan pemenuhan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setelah mendapatkan persetujuan, pelaksanaan pemekaran dilakukan secara bertahap, mulai dari pembentukan struktur pemerintahan baru, penetapan batas wilayah administratif, hingga penempatan pejabat sementara untuk menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur. Bahwa proses ini juga disertai dengan pengalokasian anggaran serta pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti kantor pemerintahan, infrastruktur jalan, serta fasilitas pelayanan publik. Beliau menjelaskan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan pemekaran Kabupaten Kolaka Timur telah melalui tahapan yang cukup panjang dan melibatkan berbagai pihak. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumardi, SE pejabat fungsional pranata komputer ahli muda pada tanggal 17 februari 2025)

c. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan pemekaran wilayah ini? Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengisi posisi-posisi strategis di pemerintahan baru, mengingat wilayah ini masih dalam tahap awal pembangunan kelembagaan.

Minimnya infrastruktur pendukung seperti jalan, kantor pemerintahan, dan fasilitas pelayanan publik menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Tantangan lainnya adalah pengelolaan anggaran daerah yang masih terbatas, sementara kebutuhan pembangunan sangat mendesak di berbagai 40 sektor. Pentingnya menjaga stabilitas sosial dan politik selama masa transisi, agar pemekaran tidak menimbulkan konflik kepentingan atau perpecahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat agar tujuan dari pemekaran wilayah ini benar-benar tercapai. Beliau mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemekaran Kabupaten Kolaka Timur tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dari segi administratif, sumber daya, maupun infrastruktur. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumardi, SE pejabat fungsional pranata komputer ahli muda pada tanggal 17 februari 2025)

d. Sejauh mana pemekaran telah meningkatkan efektivitas pemerintahan di daerah ini? Salah satu indikator yang beliau sebutkan adalah pelayanan publik yang kini lebih cepat, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Sebelum pemekaran, banyak urusan administrasi yang harus dilakukan di pusat pemerintahan Kabupaten Kolaka induk, yang jaraknya cukup jauh dan memerlukan waktu serta biaya yang tidak sedikit bagi masyarakat. Setelah terbentuknya Kabupaten Kolaka Timur, masyarakat dapat mengurus keperluannya secara langsung di wilayahnya sendiri, sehingga proses birokrasi menjadi lebih efisien.

Selain itu, beliau juga menilai bahwa dengan struktur pemerintahan yang lebih fokus dan wilayah kerja yang lebih kecil, pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah juga dinilai lebih responsif terhadap keluhan dan aspirasi

masyarakat karena kedekatan secara geografis dan 41 emosional. Namun demikian juga menekankan bahwa masih diperlukan pembenahan di beberapa sektor, terutama dalam peningkatan kualitas SDM aparatur dan penyediaan sarana pendukung, agar efektivitas pemerintahan dapat terus meningkat dari waktu ke waktu. Beliau menyampaikan bahwa pemekaran Kabupaten Kolaka Timur telah memberikan dampak positif terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut.

(Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumardi. SE pejabat fungsional pranata komputer ahli muda pada tanggal 17 februari 2025)

- e. Bagaimana strategis pemerintah dalam memastikan keberlanjutan pembangunan paca-pemekaran? Penguatan kelembagaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), penataan birokrasi yang efisien, serta perumusan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Pemerintah daerah juga aktif menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam mengarahkan pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Di bidang infrastruktur menekankan pentingnya pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan yang merata hingga ke desa- desa.

Pemerintah juga menggandeng pihak provinsi dan pusat, termasuk memanfaatkan program-program nasional, untuk mempercepat penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, beliau menyebutkan bahwa pemerintah daerah mendorong keterlibatan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), agar program-program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan strategi tersebut, diharapkan pembangunan di Kabupaten Kolaka Timur dapat berjalan secara berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2. Dampak terhadap ekonomi masyarakat

- a. Bagaimana perubahan dalam sektor ekonomi setelah pemekaran wilayah? Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor perdagangan dan jasa. Pemekaran wilayah juga mendorong pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi, seperti perbaikan jalan dan fasilitas pasar. Selain itu, kehadiran instansi pemerintah baru di daerah ini turut menciptakan peluang kerja dan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM). Namun demikian juga menekankan bahwa perubahan ini belum merata di semua kecamatan, sehingga masih diperlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di seluruh wilayah. beliau menjelaskan bahwa setelah pemekaran wilayah, sektor ekonomi di 43 Kabupaten Kolaka Timur mengalami beberapa perubahan positif. (Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sumardi. SE pejabat fungsional pranata komputer ahli muda pada tanggal 17 februari 2025)
- b. Apakah ada peningkatan investasi atau program ekonomi pascapemekaran? Program-program tersebut meliputi pengembangan sektor pertanian, perikanan, serta pemberdayaan pelaku UMKM di tingkat desa dan kecamatan. Selain itu dia juga mengungkapkan bahwa meskipun investasi dari pihak swasta belum terlalu besar, namun mulai terlihat adanya minat dari investor lokal yang melihat potensi daerah ini, khususnya dalam bidang pertanian dan perdagangan. Menurut beliau, pemekaran menjadi titik awal yang membuka peluang investasi, walaupun masih diperlukan pembenahan infrastruktur dan kepastian regulasi untuk menarik lebih banyak investasi ke wilayah ini.

Beliau menyatakan bahwa setelah pemekaran Kabupaten Kolaka Timur, terdapat beberapa upaya dari pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui program-program strategis. (Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sumardi, SE pejabat fungsional pranata komputer ahli muda pada tanggal 17 februari 2025)

- c. Bagaimana tingkat pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah pemekaran? Sebelum pemekaran, pendapatan masyarakat cenderung rendah karena terbatasnya akses terhadap fasilitas pendukung ekonomi dan kurangnya perhatian dari pemerintah pusat kabupaten induk. Namun, setelah pemekaran, mulai terjadi peningkatan pendapatan, terutama bagi 44 masyarakat yang terlibat dalam sektor- sektor yang didorong oleh pemerintah daerah seperti pertanian, perdagangan, dan jasa.

Juga menambahkan bahwa kehadiran kantor-kantor pemerintahan baru membuka lapangan pekerjaan yang ikut berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga. Meski demikian, beliau menekankan bahwa peningkatan pendapatan belum dirasakan secara merata di seluruh wilayah. Beliau menjelaskan bahwa tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur menunjukkan peningkatan setelah pemekaran wilayah. (Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sumardi, SE pejabat fungsional pranata komputer ahli muda pada tanggal 17 februari 2025)

- a. Apakah ada perubahan dalam tingkat pengangguran di daerah ini? Menurut beliau, pemekaran wilayah membawa dampak positif melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru, terutama di sektor pemerintahan, proyek-proyek pembangunan infrastruktur, serta berkembangnya sektor informal seperti perdagangan dan jasa. Menambahkan bahwa banyak masyarakat yang sebelumnya menganggur kini mulai bekerja sebagai tenaga kontrak di instansi pemerintah atau membuka usaha kecil.

Namun, beliau juga mengingatkan bahwa tantangan pengangguran masih ada, terutama bagi generasi muda yang belum memiliki keterampilan memadai atau akses terhadap pelatihan kerja. Beliau menyampaikan bahwa setelah pemekaran Kabupaten Kolaka Timur, terjadi penurunan tingkat pengangguran meskipun belum terlalu signifikan. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumardi, SE pejabat fungsional komputer ahli muda pada tanggal 17 februari 2025).

- b. Bagaimana kebijakan daerah dalam meningkatkan keesejahteraan 45 masyarakat setelah pemekaran? Kebijakan tersebut antara lain mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pengembangan sektor pertanian serta UMKM.

Dia juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah lebih fokus dalam menyalurkan bantuan meskipun kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif, namun efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya bisa dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa setelah pemekaran, pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur mulai menerapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumardi, SE pejabat fungsional pranata komputer ahli muda tanggal 17 februari 2025)

3. Dampak terhadap infastruktur

- a. Bagaimana kondisi infastruktur sebelum dan setelah pemekaran? Banyak jalan yang belum beraspal, akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan juga

sulit dijangkau, terutama di wilayah pedesaan. Namun setelah pemekaran, mulai terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur secara bertahap. Pemerintah daerah melakukan perbaikan dan pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas umum seperti puskesmas, sekolah, dan kantor pelayanan publik. Dia menilai bahwa meskipun belum merata di seluruh wilayah, pembangunan infrastruktur setelah pemekaran menunjukkan arah yang positif dan memberikan dampak langsung terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Beliau 46 menyampaikan bahwa kondisi infrastruktur di wilayah Kolaka Timur sebelum pemekaran masih sangat terbatas. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Tajuddin S.IP jabatan penata layanan oprasional pada tanggal 17 februari 2025)

- b. Apakah proyek infastruktur utama yang telah atau sedang dibangun setelah pemekaran? Pembangunan dan peningkatan jalan penghubung antar kecamatan, pembangunan kantor-kantor pemerintahan seperti kantor bupati dan dinas-dinas, serta pembangunan fasilitas layanan publik seperti rumah sakit daerah, puskesmas, dan sekolah-sekolah baru. Selain itu dia juga menyebutkan bahwa pembangunan jaringan irigasi untuk mendukung sektor pertanian menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Menurut beliau, proyek-proyek ini menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kolaka Timur. Beliau menjelaskan bahwa setelah pemekaran Kabupaten Kolaka Timur, terdapat beberapa proyek infrastruktur utama yang telah dan sedang dibangun oleh pemerintah daerah. (Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Rahmat Tajuddin S.IP jabatan penata layanan oprasional pada tanggal 17 februari 2025)
- c. Sejauh mana akses masyarakat terhadap fasilitas publik meningkatkan setelah pemekaran? Sebelum pemekaran, masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan karena keterbatasan fasilitas dan jauhnya jarak tempuh. Namun setelah pemekaran, pemerintah daerah mulai membangun 47 fasilitas-fasilitas publik seperti puskesmas, sekolah, serta kantor-kantor pelayanan di tingkat kecamatan dan desa. Dia menilai bahwa peningkatan ini sangat membantu masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman, karena mereka kini dapat memperoleh layanan dasar dengan lebih cepat dan mudah.

Meski demikian, beliau juga menekankan bahwa masih ada beberapa wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal pemerataan pembangunan fasilitas publik. Beliau menyampaikan bahwa akses masyarakat terhadap fasilitas publik mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah pemekaran Kabupaten Kolaka Timur.

(Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Tajuddin S.IP jabatan penata layanan oprasional pada tanggal 17 februari 2025)

- a. Apa kendala utama dalam pembangunan infastruktur pasca-pemekaran? Sebagai daerah otonom baru, kemampuan fiskal pemerintah masih terbatas sehingga pembangunan harus dilakukan secara bertahap. Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa kondisi geografis yang cukup menantang, seperti wilayah perbukitan dan daerah terpencil, menjadi hambatan dalam mempercepat pembangunan. Di sisi lain, kurangnya tenaga teknis dan peralatan pendukung juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur. Meskipun demikian, beliau menyatakan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui kerja sama dengan pemerintah provinsi

maupun pusat. Beliau mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama dalam pembangunan infrastruktur pasca-pemekaran di Kabupaten Kolaka Timur adalah keterbatasan anggaran daerah.

(Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Tajuddin S.IP jabatan penata layanan oprasional pada tanggal 17 februari 2025)

- b. Bagaimana strategis pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur? Salah satu strategi utama adalah dengan menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang terarah dan berkelanjutan, serta memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung pelayanan dasar masyarakat seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, dia menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pemeliharaan hasil pembangunan, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mendapatkan dukungan anggaran dan teknis. Menurut beliau, dengan perencanaan yang matang dan pelibatan semua pihak, keberlanjutan pembangunan dapat terjaga secara bertahap dan merata. Beliau menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menerapkan beberapa strategi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur pasca- pemekaran. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Tajuddin S.IP jabatan penata layanan oprasional pada tanggal 17 februari 2025)

Pertanyaan untuk Masyarakat Umum

Kehidupan Sehari-hari dan Pemekaran Daerah

- a. Apakah anda merasakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari setelah pemekaran? Ia menyebutkan bahwa pelayanan publik kini lebih mudah diakses, seperti pengurusan administrasi kependudukan yang sebelumnya 49 harus dilakukan di kabupaten induk, kini sudah bisa diselesaikan di tingkat kecamatan. Selain itu, perbaikan infrastruktur jalan juga mempermudah mobilitas warga dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial. Dia juga merasa bahwa pemerintah daerah lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meski masih ada beberapa kekurangan, seperti akses air bersih dan fasilitas umum di daerah terpencil, secara umum ia mengaku puas dengan perubahan yang terjadi setelah pemekaran. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Warga ibu Ita Apriani pada tanggal 20 februari 2025)
- b. Bagaimana pemekaran ini mempengaruhi pekerjaan dan penghasilan anda? Ia menjelaskan bahwa setelah pemekaran, peluang kerja di wilayahnya mulai terbuka, terutama melalui proyek pembangunan infrastruktur dan kebutuhan tenaga kerja di instansi pemerintah daerah. Dia juga mengaku sempat bekerja sebagai tenaga harian dalam proyek pembangunan jalan desa, yang membantu menambah penghasilannya. Selain itu, dengan semakin baiknya akses jalan dan pasar lokal, ia juga bisa menjual hasil kebun dengan lebih mudah, yang berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga. Meski belum sepenuhnya stabil, dia merasa kehidupannya mulai membaik dibandingkan sebelum pemekaran. Beliau menyampaikan bahwa pemekaran Kabupaten Kolaka Timur memberikan dampak positif terhadap pekerjaan dan penghasilannya. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Warga ibu Ita Apriani pada 50 tanggal 20 februari 2025)
- c. Apakah ada perubahan dalam harga kebutuhan pokok dan biaya hidup setelah pemekaran? Menurutnya, harga beberapa barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan, terutama pada masa awal pemekaran, karena distribusi barang masih terbatas dan infrastruktur belum sepenuhnya memadai. Namun, seiring

dengan pembangunan jalan dan pasar lokal, distribusi barang menjadi lebih lancar sehingga harga mulai stabil. Dia juga menyebutkan bahwa biaya hidup secara umum memang sedikit meningkat, namun hal tersebut sebanding dengan bertambahnya peluang kerja dan penghasilan masyarakat. Ia berharap pemerintah terus menjaga kestabilan harga dan mendukung ekonomi lokal agar biaya hidup tetap terjangkau. Beliau menyampaikan bahwa setelah pemekaran Kabupaten Kolaka Timur, terjadi beberapa perubahan dalam harga kebutuhan pokok dan biaya hidup. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Warga ibu Ita Apriani pada tanggal 20 februari 2025).

Akses terhadap Infrastruktur dan Layanan Publik

1. Bagaimana kondisi jalan, air bersih, dan listrik di daerah anda sebelum dan sesudah pemekaran? Akses terhadap air bersih juga sangat terbatas, dengan sebagian besar warga masih mengandalkan sumur atau mengambil air dari sungai. Sementara itu, pasokan listrik belum merata, dan masih ada beberapa dusun yang belum teraliri listrik secara penuh. Namun setelah pemekaran, secara bertahap terjadi perbaikan infrastruktur. Jalan-jalan utama mulai diperbaiki dan diaspal, beberapa titik air bersih mulai dibangun dengan bantuan pemerintah, serta perluasan jaringan listrik mulai dilakukan. Meskipun belum semua wilayah menikmati fasilitas tersebut secara maksimal, dia merasa adanya perubahan yang cukup signifikan dan berharap pembangunan terus dilanjutkan. Beliau menjelaskan bahwa sebelum pemekaran, kondisi jalan di daerahnya masih banyak yang rusak dan belum beraspal, sehingga menyulitkan mobilitas warga, terutama saat musim hujan. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Warga Bapak Andi Amir Fadly pada tanggal 20 februari 2025)
2. Apakah akses ke sekolah dan layanan kesehatan lebih mudah dibandingkan sebelumnya? Sebelumnya, anak-anak harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mencapai sekolah, dan warga harus pergi ke kota kabupaten induk untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar. Namun setelah pemekaran, pemerintah daerah mulai membangun sekolah-sekolah baru dan puskesmas di tingkat kecamatan dan desa. Menurut dia, hal ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam keadaan darurat kesehatan maupun untuk kelangsungan pendidikan anak-anak. Ia juga menambahkan bahwa pelayanan kini lebih cepat dan tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi yang besar seperti dulu. Beliau menyampaikan bahwa akses ke sekolah dan layanan kesehatan menjadi lebih mudah setelah pemekaran Kabupaten Kolaka Timur. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Warga Bapak Andi Amir Fadly pada tanggal 20 februari 2025)
3. Apa yang masih menjadi kendala utama dalam infrastruktur daerah ini? Salah satu kendala yang disebutkan adalah masih banyaknya jalan penghubung antar desa yang belum diperbaiki atau belum diaspal, sehingga menyulitkan aktivitas terutama saat musim hujan. Selain itu, akses terhadap air bersih belum merata di seluruh wilayah, dan sebagian warga masih mengandalkan sumber air alami yang tidak selalu bersih. Dia juga menyoroti bahwa aliran listrik belum stabil di beberapa dusun, sering terjadi pemadaman, dan belum semua rumah teraliri listrik. Ia berharap pemerintah daerah dapat mempercepat pemerataan infrastruktur agar seluruh masyarakat merasakan manfaat yang sama dari hasil pemekaran. Beliau menyampaikan bahwa meskipun telah terjadi kemajuan dalam pembangunan infrastruktur sejak pemekaran, masih terdapat beberapa kendala utama yang dirasakan masyarakat. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Warga Bapak Andi Amir Fadly pada tanggal 20 februari 2025)

Harapan Terhadap Pembangunan Daerah

1. Apa harapan anda terhadap pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Kolaka Timur? Ia berharap pemerintah daerah lebih fokus pada peningkatan akses jalan, ketersediaan air bersih, dan jaringan listrik yang stabil, karena hal-hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, dia juga berharap agar ada lebih banyak program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kecil, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan usaha, agar warga bisa lebih mandiri secara ekonomi.

Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan akan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Beliau mengungkapkan harapannya agar pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Kabupaten Kolaka Timur terus ditingkatkan dan merata ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Warga Ibu Hastuti pada tanggal 20 februari 2025)

1. Menurut anda, apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Menurutnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan air bersih masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah terpencil. Selain itu, dia menekankan pentingnya menciptakan lapangan pekerjaan melalui program pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, serta dukungan bagi usaha kecil dan menengah.

Ia juga berharap agar bantuan sosial dan program ekonomi tepat sasaran, sehingga benar-benar dirasakan oleh warga yang membutuhkan. Dia meyakini bahwa dengan perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat secara bertahap.

Beliau menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah perlu lebih memperhatikan pembangunan yang merata hingga ke desa-desa. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Warga Ibu Hastuti pada tanggal 20 februari 2025)

2. Bagaimana anda melihat peran pemerintahan dalam mengatasi 54 tantangan setelah pemekaran? Dia menilai bahwa pemerintah telah berupaya membangun infrastruktur dasar, memperbaiki pelayanan publik, serta mendekatkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan. Namun, ia juga mencatat bahwa dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemerataan pembangunan, serta belum maksimalnya penyerapan aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah perlu lebih aktif turun ke lapangan, mendengarkan kebutuhan warga secara langsung, dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan agar tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dengan lebih efektif dan merata. Beliau menyampaikan bahwa peran pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pasca-pemekaran sudah cukup baik, meskipun masih terdapat banyak hal yang perlu ditingkatkan. (Berdasarkan hasil wawancara dengan Warga Ibu Hastuti pada tanggal 20 februari 2025)

Pembahasan

Sebelum pemekaran, wilayah Kolaka Timur masih menjadi bagian dari Kabupaten Kolaka. Pada saat itu, akses terhadap layanan publik masih terbatas, terutama di daerah terpencil. Infrastruktur jalan yang kurang memadai menyebabkan distribusi barang dan mobilitas masyarakat menjadi sulit. Selain itu, masyarakat sering menghadapi kendala dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan karena jarak yang jauh ke pusat pemerintahan. Setelah pemekaran, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam 55 berbagai aspek.

Dari segi ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kolaka Timur mengalami peningkatan yang stabil setiap tahunnya. Sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan berkembang lebih cepat karena adanya kebijakan yang lebih fokus pada kebutuhan lokal. Selain itu, jumlah UMKM juga meningkat, didukung oleh program pemerintah daerah yang memberikan bantuan modal dan pelatihan usaha.

Pemekaran Kabupaten Kolaka Timur memberikan dampak yang signifikan terhadap aspek sosial masyarakat setempat. Salah satu dampak utama adalah perubahan struktur sosial dan dinamika masyarakat. Dengan adanya pemekaran, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah karena pemerintahan menjadi lebih dekat dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Selain itu, pemekaran juga mendorong tumbuhnya rasa identitas daerah yang lebih kuat, di mana masyarakat Kolaka Timur semakin memiliki kebanggaan terhadap wilayahnya sendiri. Selain itu, pemekaran juga berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Dengan adanya pemerintahan yang lebih dekat, pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan menjadi lebih prioritas. Akses terhadap layanan pendidikan meningkat, yang terlihat dari bertambahnya jumlah sekolah dan peningkatan angka partisipasi sekolah. Dalam sektor kesehatan, pemekaran telah mempercepat pembangunan puskesmas dan rumah sakit daerah, sehingga layanan kesehatan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pemekaran wilayah juga telah memberikan dampak positif dalam hal administrasi dan birokrasi. Pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat memungkinkan proses pelayanan administrasi menjadi lebih cepat dan efisien. Misalnya, pengurusan dokumen kependudukan, perizinan usaha, dan bantuan sosial dapat dilakukan tanpa harus pergi ke ibu kota kabupaten sebelumnya.

Di bidang infrastruktur, efektivitas pelayanan publik juga meningkat dengan adanya pembangunan jalan dan fasilitas umum. Sebelum pemekaran, banyak wilayah yang mengalami keterbatasan akses transportasi dan minim fasilitas umum. Setelah pemekaran, terjadi peningkatan pembangunan jalan desa, jembatan, dan fasilitas publik lainnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, dan data dokumentasi yang telah peneliti dapatkan pemekaran wilayah ini memberikan dampak yang bervariasi terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

1. Perkembangan Sektor Ekonomi Pemekaran wilayah membuka peluang bagi perkembangan sektor ekonomi, terutama dalam bidang pertanian, perikanan, perdagangan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dari hasil wawancara dengan pelaku ekonomi lokal, ditemukan bahwa adanya pemerintahan daerah baru memberikan perhatian lebih pada pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Sebelum pemekaran, masyarakat di daerah ini menghadapi keterbatasan akses pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi.

Berdasarkan data dari BPS Kolaka Timur (2023), sekitar 65% masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan. Pada tahun 2013, sebelum pemekaran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kolaka Timur tercatat sebesar Rp12,5 triliun (BPS, 2013). Setelah pemekaran pada tahun 2015, PDRB meningkat menjadi Rp13,7 triliun dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp20,4 triliun pada tahun 2023 (Dinas Perencanaan Daerah, 2023).

Proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan PDRB akan mencapai Rp21,5 triliun. Kenaikan ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil setelah pemekaran, meskipun masih ada tantangan dalam pemerataan pembangunan. Namun, PDRB per kapita Kolaka Timur pada

tahun 2023 masih tercatat 58 sebesar Rp28,93 juta per tahun, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi Sulawesi Tenggara yang mencapai Rp39,34 juta (BPS, 2023). Struktur ekonomi daerah tetap didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang 41,04% terhadap PDRB. Meskipun sektor perdagangan mengalami pertumbuhan dengan kontribusi sebesar 14,82% pada tahun 2023, sektor industri pengolahan masih minim, hanya berkontribusi sebesar 2,43% (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa hilirisasi produk pertanian dan perikanan masih perlu ditingkatkan agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat. Produksi perikanan juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.

Pada tahun 2013, total produksi perikanan tercatat sebesar 3.800 ton, meningkat menjadi 4.100 ton pada tahun 2015, dan mencapai 5.200 ton pada tahun 2023 (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023). Namun, sebagian besar hasil perikanan masih dijual dalam bentuk mentah ke daerah lain akibat minimnya fasilitas pengolahan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan investasi dalam sektor pengolahan hasil perikanan untuk mendorong peningkatan ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasar luar daerah.

2. Perkembangan UMKM dan Peningkatan Investasi Sejak pemekaran, jumlah UMKM di Kolaka Timur mengalami peningkatan yang cukup pesat. Pada tahun 2013, tercatat ada 2.800 unit 59 usaha kecil dan menengah yang aktif (Dinas Koperasi dan UMKM, 2013). Jumlah ini meningkat menjadi 3.500 unit pada tahun 2015 dan terus bertambah hingga mencapai 5.200 unit pada tahun 2023.

Proyeksi tahun 2024 menunjukkan jumlah UMKM akan bertambah menjadi 5.500 unit. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemekaran telah memberikan dorongan bagi pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah, terutama di bidang kuliner, kerajinan tangan, dan jasa.

Untuk mendukung pertumbuhan UMKM, pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan modal usaha dengan total anggaran sebesar Rp5 miliar pada tahun 2023 (Dinas Koperasi dan UMKM, 2023). Bantuan ini mencakup lebih dari 1.200 UMKM, yang sebagian besar bergerak di sektor pertanian, perdagangan, dan industri rumah tangga. Namun, masih ada tantangan dalam akses pasar dan pemasaran produk UMKM yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Di sisi lain, investasi di Kolaka Timur juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Pada tahun 2021, realisasi investasi mencapai Rp150 miliar dan meningkat menjadi Rp230 miliar pada tahun 2023 (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2023). Sektor yang paling banyak menarik investasi adalah pertanian, perdagangan, dan infrastruktur. Namun, masih ada kendala dalam menarik investasi skala besar akibat keterbatasan lahan dan perizinan yang masih membutuhkan proses panjang. Jika pemerintah dapat menyederhanakan birokrasi dan menyediakan lahan investasi yang memadai, maka pertumbuhan investasi di Kolaka Timur dapat lebih optimal.

3. Tingkat Pendapatan dan UMR Setempat Berdasarkan wawancara dengan masyarakat dan data dari laporan 60 Pemkab Kolaka Timur, tingkat pendapatan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10% dalam lima tahun terakhir (Dinas Tenaga Kerja, 2023). Peningkatan ini terutama dirasakan oleh mereka yang bekerja di sektor jasa, perdagangan, dan konstruksi, sedangkan petani dan nelayan masih menghadapi kendala dalam peningkatan pendapatan akibat ketidakstabilan harga hasil produksi mereka.

Upah Minimum Regional (UMR) Kolaka Timur juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2013, UMR tercatat sebesar Rp1.750.000, meningkat menjadi Rp2.100.000 pada tahun 2015 (Dinas Tenaga Kerja, 2015). Kenaikan terus berlanjut hingga tahun 2023, di mana UMR mencapai Rp3.100.000. Proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan adanya kenaikan lebih lanjut hingga Rp3.250.000 (Dinas Tenaga Kerja, 2024). Meskipun kenaikan ini memberikan dampak positif bagi daya beli masyarakat, distribusi barang yang belum optimal menyebabkan harga kebutuhan pokok tetap tinggi di beberapa kecamatan.

Pemetaan Daerah Kabupaten Kolaka Timur

Sebagai daerah yang baru dimekarkan, pemetaan wilayah Kabupaten Kolaka Timur menjadi aspek penting dalam perencanaan pembangunan dan pemerataan infrastruktur. Kabupaten ini terdiri dari beberapa kecamatan yang memiliki karakteristik geografis dan ekonomi yang berbeda-beda. Berikut adalah pemetaan wilayah berdasarkan potensi dan perkembangan infrastruktur:

1. Wilayah Pusat Pemerintahan: Kecamatan Tirawuta menjadi pusat administrasi pemerintahan dengan pembangunan fasilitas perkantoran yang berkembang pesat setelah pemekaran.
2. Wilayah Pertanian: Kecamatan Loea dan Poli-Polia merupakan sentra pertanian utama, dengan komoditas unggulan seperti padi, kakao, dan lada.
3. Wilayah Perikanan: Kecamatan Lambandia dan Aere memiliki potensi besar dalam sektor perikanan tangkap dan budidaya, terutama di sepanjang pesisir pantai.
4. Wilayah Industri dan Perdagangan: Kecamatan Ladongi mulai berkembang sebagai pusat perdagangan dan industri kecil, didukung dengan adanya pasar dan terminal distribusi barang.
5. Wilayah Wisata dan Konservasi: Beberapa daerah seperti Uluiwoi dan Ueesi memiliki potensi ekowisata dengan hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati yang masih terjaga. Peta wilayah Kabupaten Kolaka Timur dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai penyebaran potensi ekonomi dan infrastruktur yang telah dibangun, serta menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan daerah di masa mendatang.

Upaya Pemerintah dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menyadari bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beberapa upaya konkret telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat agar lebih siap bersaing dalam dunia kerja serta mendukung sektor ekonomi lokal. Berikut adalah beberapa aksi nyata yang telah diterapkan:

1. Program Beasiswa Pendidikan: Pemerintah daerah menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi dan dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Pada tahun 2023, sebanyak 500 mahasiswa mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah daerah (Dinas Pendidikan, 2023).
2. Pelatihan Keterampilan dan Wirausaha: Melalui Dinas Ketenagakerjaan dan UMKM, pemerintah menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat, seperti pelatihan menjahit, membatik, perbengkelan, dan digital marketing. Program ini telah menjangkau lebih dari 1.200 peserta pada tahun 2023.
3. Program Magang dan Sertifikasi Profesi: Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, pemerintah bekerja sama dengan perusahaan lokal dan nasional dalam menyediakan program magang dan sertifikasi keahlian di bidang

pertanian, perikanan, industri, dan teknologi. Hingga tahun 2023, lebih dari 800 peserta telah mengikuti program ini (Dinas Tenaga Kerja, 2023).

4. Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda: Pemerintah mendorong program ekonomi kreatif bagi perempuan dan pemuda dengan memberikan bantuan modal usaha dan pendampingan bisnis. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda di Kolaka Timur dan mengurangi tingkat pengangguran.
5. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK): Sebagai bentuk komitmen dalam peningkatan SDM, pemerintah telah membangun Balai Latihan Kerja yang menyediakan pelatihan berbasis kompetensi di berbagai sektor, termasuk industri, jasa, dan teknologi informasi. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kolaka Timur.

Opini Masyarakat tentang Dampak Pemekaran Kabupaten Kolaka Timur

1. Masyarakat Umum Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa pemekaran membawa dampak positif, terutama dalam hal akses pelayanan publik. Sebelumnya, warga harus menempuh perjalanan jauh ke ibu kota Kabupaten Kolaka untuk mengurus administrasi kependudukan dan layanan.
2. Pelaku Usaha dan UMKM Para pelaku UMKM merasakan dampak positif dalam hal dukungan dari pemerintah daerah. Bantuan modal usaha dan pelatihan wirausaha 66 66 menjadi lebih mudah didapatkan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. "Sejak pemekaran, kami mendapat banyak pelatihan dan bantuan peralatan usaha. Pemerintah lebih memperhatikan usaha kecil seperti kami," ujar seorang pengusaha kuliner di Tirawuta.
3. Petani dan Nelayan Pemekaran juga membawa dampak bagi petani dan nelayan, terutama dalam penyediaan sarana pertanian dan perikanan. Seorang petani di Kecamatan Loea mengatakan, "Kami mendapat bantuan pupuk dan alat pertanian lebih sering dibandingkan sebelum pemekaran." Hal ini menunjukkan adanya perhatian lebih terhadap sektor pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian masyarakat.
4. Kaum Muda dan Tenaga Kerja Kaum muda di Kolaka Timur menyambut baik pemekaran karena membuka peluang kerja baru, terutama di sektor pemerintahan dan pembangunan infrastruktur. "Dulu pilihan kerja sedikit, tapi sekarang banyak proyek pembangunan yang butuh tenaga kerja lokal," ujar seorang pekerja konstruksi di Kecamatan Mowewe.
5. Tokoh Masyarakat dan Pemimpin Adat Dari perspektif tokoh masyarakat, pemekaran dianggap sebagai langkah maju untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Ini adalah kesempatan bagi kita untuk membangun daerah sendiri dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada Kolaka," ujar seorang tokoh adat di Kecamatan Uluiwoi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemekaran Kabupaten Kolaka Timur memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam sektor ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik, hingga dinamika sosial. Pemekaran wilayah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, mempercepat pembangunan, serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang lebih terfokus pada potensi lokal.

Dari segi ekonomi, pemekaran telah mendorong pertumbuhan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM. Peningkatan investasi dan jumlah usaha kecil menengah menunjukkan bahwa masyarakat lebih aktif dalam mengembangkan

perekonomian daerah. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemasaran produk lokal, stabilitas harga komoditas, dan kurangnya industri pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah bagi hasil pertanian dan perikanan. Meskipun UMR mengalami peningkatan, ketimpangan akses terhadap pekerjaan tetap menjadi permasalahan, terutama bagi generasi muda yang mengharapkan lebih banyak industri dan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Dalam aspek infrastruktur, pemekaran telah mempercepat pembangunan fasilitas publik seperti jalan, jembatan, pasar, sekolah, dan pusat kesehatan. Perbaikan jaringan listrik dan air bersih juga memberikan manfaat bagi banyak masyarakat. Namun, pembangunan masih terpusat di beberapa kecamatan utama, sementara daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan dalam akses transportasi dan layanan dasar. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan tetap menjadi tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah.

Referensi :

- Akhmad, R. (2015). "Pemekaran Daerah dan Peningkatan Kesejahteraan: Studi Kasus di Indonesia". *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Alfita, V., Matoka, U., & Dja'wa, A. (2022). Studi Proses Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa. *JEMBA: JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(1), 23-32.
- Assiddiq, D. U., Bisri, M. H., Handayani, S., Imron, M., & Ambarwati, D. (2023).
- Ayu, N. A., Wulan, H. S., & Budi, L. (2021). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kemampuan Manajerial, dan Disiplin terhadap Kinerja Karyawan. Badan Pusat Statistika Kab. Kolaka Timur. (2023). Kolaka Timur Dalam Angka 2023. Katalog 1002001.7411
- Barro, R. J. (1990). "Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth". *Journal of Political Economy*.
- Bimantio, M. P., & Tontowi, A. E. (2017). Konsep ABG (Academic-Business-Government) dalam Rencana Sistem Industri Berbasis Potensi Daerah Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul. *Teknik*, 38(2), 113-118.
- BPS (Badan Pusat Statistik) (2023). *Laporan Tahunan Pemekaran Wilayah Indonesia*.
- BPS (Badan Pusat Statistik), *Laporan Pembangunan Daerah Kolaka Timur*.
- BPS (Badan Pusat Statistik). *Laporan Tahunan Pemekaran Wilayah Indonesia*. (<https://www.bps.go.id>)
- Darmawan, S. (2014). *Pembentukan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara* (Doctoral dissertation, Universitas Hassanuddin).
- Hamzah, M., Syukur, M., Salam, M. N., & Junaidi, M. I. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia: Analisis terhadap sektor domestik dan stabilitas inflasi. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 2(3), 382-388.

- Harianti, H., & Fait, T. (2021). Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur. *Journal of Public Administration and Government*, 3(2), 105-111.
- Hill, H. (1996). *The Indonesian Economy Since 1966: Southeast Asia's Emerging Giant*.
- Kartomo, K., Sapriyadi, S., & Syam, S. F. (2023). Analisis Potensi Ekonomi Sektoral Kabupaten Kolaka Timur. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 259-265.
- Komunikasi Pembangunan dan Mekanisme Bentuk Rancangan Peraturan Desa Mengenai Tata Kelola Aset Desa. *Jurnal Nomosleca*, 9(1), 158-178.
- Lantara, L. A. T. A. (2016). Pengaruh Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pembangunan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.
- Maulana, A., Maulana, R., Fauzan, M., & Bindas, H. (2021). Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Sungai Luar Indragiri Hilir. *Literacy*, 3(1), 1-11.
- Nurasiah., Sutisna, A. J., & Yumhi. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi, Kemampuan Manajerial dan Disiplin terhadap Kinerja. *E-Jurnal Studia Manajemen*, 9(1), 83-100.
- Penggabungan Daerah PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan
- Rostow, W. W. (1960). *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*.
- Rostow, W.W. (1960). *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist*
- Solow, R. M. (1956). "A Contribution to the Theory of Economic Growth". *Quarterly Journal of Economics*.